

**PENGAUATAN MODAL SOSIAL KELEMBAGAAN TANI DALAM  
MENDUKUNG PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PANGAN DAN  
AGRIBISNIS PERDESAAN**

Yohanes G. Bulu

*Disampaikan dalam Seminar "Kebijakan Revitalisasi Mendukung Diversifikasi Pangan dan Transformasi  
Pembangunan Pertanian Jangka Panjang, Cipayung, Bogor, 24 – 25 Oktober 2013*



**BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2013**

# **PENGAUATAN MODAL SOSIAL KELEMBAGAAN TANI DALAM Mendukung PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PANGAN DAN AGRIBISNIS PERDESAAN**

Yohanes G. Bulu

Email: [yahanegeli@gmail.com](mailto:yahanegeli@gmail.com),

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB

## **PENDAHULUAN**

Jumlah penduduk miskin di perdesaan Indonesia pada bulan Maret 2008 tercatat 22,21 juta orang (18,93 persen) dan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di perdesaan Indonesia sampai dengan bulan Maret 2009 tercatat 20,62 juta orang (17,35 persen) maka terjadi penurunan 1,59 juta orang (1,58 persen) (BPS, 2008 - 2009). Sebagian besar (80 %) penduduk miskin perdesaan bekerja di sektor pertanian dengan pemilikan lahan kurang dari 0,3 ha sampai dengan yang tidak memiliki lahan yang selama ini mengalami kesulitan mengakses permodalan pada lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha taninya.

Jumlah penduduk miskin propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih cukup tinggi, yaitu sampai Maret 2008 jumlah penduduk miskin mencapai 1.080.000,6 juta orang atau (23,81%). Hingga bulan Maret 2009 jumlah penduduk miskin di NTB mengalami penurunan, yaitu mencapai 1.050.000,9 juta orang atau (22,78%) dibanding jumlah penduduk miskin sampai Maret 2008. Jumlah penduduk miskin di perdesaan propinsi NTB sampai Maret 2008 mencapai 520.000,2 orang atau (19,73%) dan sampai bulan Maret 2009 mengalami penurunan hingga mencapai 493.000,4 ribu orang atau (18,40 %) (BPS Indonesia, 2008 - 2009). Masih tingginya jumlah penduduk miskin perdesaan di NTB disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain tingginya fragmentasi lahan pertanian yang menyebabkan pemilikan sempit, terbatasnya peluang peningkatan usaha disektor pertanian karena permodalan yang terbatas, kurangnya lapangan pekerjaan, dan masih tingginya pengangguran, yaitu mencapai 45.231 orang pada tahun 2008. Kemiskinan dan pengangguran di wilayah perdesaan disebabkan oleh lemahnya pemberdayaan kelembagaan tani berbasis modal sosial dalam pengembangan diversifikasi pangan.

Pada dasarnya diversifikasi pangan mencakup tiga lingkup pengertian yang saling berkaitan, yaitu (1) diversifikasi konsumsi pangan, (2) diversifikasi ketersediaan pangan, dan (3) diversifikasi produksi pangan (Suhardjo, 1998). Menurut Budiningsih (2009), menjelaskan bahwa diversifikasi pangan meliputi diversifikasi horizontal dan vertikal. Diversifikasi horizontal adalah penganekaragaman konsumsi pangan dengan memperbanyak macam komoditi pangan dan meningkatkan produksi dari macam-macam komoditi tersebut. Diversifikasi vertikal adalah penganekaragaman pengolahan komoditas pangan, terutama non beras sehingga mempunyai nilai tambah dari segi ekonomi, nutrisi maupun sosial.

Diversifikasi pangan secara eksplisit telah dicanangkan pemerintah dengan kebijakan diversifikasi pangan pada akhir Pelita I (1974) melalui Intruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat, dan disempurnakan melalui Inpres No. 20 tahun

1979. Tujuan dari Intruksi Presiden tersebut adalah untuk lebih menganekaragamkan jenis pangan dan meningkatkan mutu gizi makanan rakyat secara kualitas dan kuantitas sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Pelaksanaan kebijakan tersebut diartikan sempit melalui penurunan tingkat konsumsi beras, sehingga kegiatan yang dilakukan adalah demonstrasi masak-memasak dan pameran dari hasil pertanian non padi. Pameran dan demonstrasi pun dilakukan oleh instansi terkait dan bukan dari kelembagaan tani (kelompok wanita tani). Kebijakan pemerintah melalui Intruksi Presiden tersebut tidak memperlihatkan perubahan terhadap pengembangan diversifikasi pangan untuk mengangkat produk-produk pangan non beras.

Setelah Indonesia mencapai swasembada beras terdapat kecenderungan masyarakat bahwa tergantung pada konsumsi beras. Kondisi ini mendorong pemerintah melalui Departemen Pertanian melaksanakan Program Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG) pada tahun 1991/1992. Program DPG berbeda dengan kondisi Dasa Warsa yang dilakukan pemerintah pada tahun 1960-an karena terjadi krisis pangan. Di beberapa wilayah perdesaan di NTB masih mengingat Dasa Warsa karena masih terdapat beberapa kelompok dasa warsa. Program DPG bertujuan untuk: *pertama*, mendorong meningkatnya ketahanan pangan rumah tangga. *Kedua*, mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat terutama di perdesaan untuk mengkonsumsi pangan yang beranekaragam dan bermutu gizi seimbang. Fokus pelaksanaan program DPG pada waktu itu adalah melakukan pemberdayaan kelompok rawan pangan di wilayah miskin dengan memanfaatkan pekarangan untuk menyediakan aneka ragam kebutuhan pangan. Pendampingan dan pembinaan yang dilakukan melalui program DPG tersebut tidak terbatas pada aspek budidaya tapi juga aspek pengolahan hasil dan penanganan pasca panen. Tujuannya adalah agar hasil pertanian yang diproduksi petani dapat diolah guna memenuhi selera masyarakat secara luas (Program DPD Pusat, 1998).

Presiden RI pada acara Konferensi Dewan Ketahanan Pangan di Jakarta International Convention Center (JICC) bulan Oktober 2010, menyatakan bahwa ketahanan dan kemandirian pangan nasional harus dimulai dari rumah tangga. Pada tahun 2011 pemerintah melalui Kementerian Pertanian melaksanakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Sasaran pelaksanaan program tersebut adalah pemanfaatan pekarangan yang memfokuskan terhadap ketersediaan dan aksesoris pangan oleh masyarakat. Tujuan pelaksanaan Program KRPL, yaitu: (1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan di perkotaan maupun perdesaan untuk budidaya tanaman pangan, buah-buahan, sayuran dan tanaman obat keluarga, pemeliharaan ternak dan ikan, pengolahan hasil serta pengolahan limbah rumah tangga; (2) Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat secara lestari dalam suatu kawasan; (3) Memelihara sumberdaya genetik/plasma nutfah lokal; (4) Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga dan menciptakan lingkungan hijau yang bersih dan sehat secara mandiri (BPTP NTB, 2012). Dilihat tujuan program tersebut jelas sangat berbeda dengan program DPG, karena pelaksanaan program KRPL lebih dominan pembinaan teknis budidaya dan tidak melakukan pendampingan kelembagaan dalam pengolahan hasil. Dampak dari pelaksanaan program ini belum membawa

perubahan terhadap ketahanan dan kemandirian pangan masyarakat.

Berbagai program yang dilakukan pemerintah seperti program PUAP, PSDSK dan LDPM serta BANSOS lainnya seperti program kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM), BLT, dan program stimulan lainnya serta perbaikan infrastruktur perdesaan belum secara optimal mendorong laju pertumbuhan ekonomi penduduk miskin dan pengurangan pengangguran.

Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok nasional dan daerah yang perlu mendapat prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dan sosial di perdesaan. Penumbuhan dan pengembangan ekonomi dan sosial di perdesaan akan diprioritaskan di sektor pertanian untuk pengembangan diversifikasi pangan dan agribisnis perdesaan. Pengembangan diversifikasi pangan dan agribisnis perdesaan tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan lama seperti *human capital* dan *social capital*, jaringan komunikasi dan kerjasama, produksi usaha tani, pemasaran, dan masalah permodalan petani yang terbatas.

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penentu pengambilan keputusan dalam adopsi inovasi. Modal manusia (*human capital*) berkaitan dengan tingkat pengetahuan, pengalaman, keterampilan, motivasi, dan sikap yang dimiliki oleh individu-individu (Schuller, 2001, dan Cote, 2001). Parameter-parameter modal manusia tersebut yang relevan dengan aktivitas pengembangan diversifikasi pangan dan agribisnis perdesaan.

Modal sosial (*social capital*) yang memfokuskan pada jaringan-jaringan, hubungan antarindividu, saling percaya, dan norma yang mengatur hubungan kerjasama (Putnam, 1995). Modal sosial dapat dimanfaatkan dalam penguatan kelembagaan tani untuk mengembangkan diversifikasi pangan dan agribisnis perdesaan. Bourdeau mendefinisikan modal sosial adalah agregat sumber daya aktual atau potensial yang diikat untuk mewujudkan jaringan yang awet sehingga melembagakan hubungan persahabatan yang saling menguntungkan (Yustika, 2006).

Jaringan kerjasama petani dalam kelompok tani pada kegiatan pengembangan diversifikasi pangan dan agribisnis perdesaan di NTB belum dilandasi oleh modal sosial yang kuat. Pendampingan kelembagaan tani (kelompok wanita tani/KWT) dalam penerapan teknologi pengolahan hasil pertanian sebagai bentuk dan proses pengembangan diversifikasi pangan belum dilakukan secara optimal. Diversifikasi pangan jangan diartikan secara terbatas sebagai pola penganeekaragaman makanan namun harus dipahami dari segi proses untuk menghasilkan berbagai jenis makanan olahan dari hasil usahatani yang diproduksi petani. Misalnya talas dan ubi jalar yang umumnya dikonsumsi masyarakat dengan tanpa di olah kurang menarik bagi sekelompok masyarakat tertentu. Melalui penggunaan teknologi dapat diolah untuk menghasilkan berbagai jenis makanan olahan yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, seperti: steak talas, kripik, krispi, bergedel dan lain-lain. Pengembangan diversifikasi pangan melalui penerapan teknologi pengolahan hasil yang diarahkan ke usaha agribisnis perdesaan memerlukan peningkatan kapasitas *human capital* pada KWT. Peningkatan *human capital* pada KWT dalam pengolahan hasil pertanian membutuhkan pendampingan secara terus menerus oleh pihak terkait. Kegiatan pengolahan hasil pertanian yang dilakukan oleh KWT

dan usaha rumah tangga perdesaan dapat dikembangkan menjadi kegiatan agribisnis yang perlu didukung oleh jaringan informasi inovasi dan kerjasama.

Jaringan informasi inovasi dan kerjasama merupakan salah satu bentuk modal sosial yang belum berjalan secara baik dalam proses pengembangan diversifikasi pangan dan agribisnis di perdesaan. Jaringan informasi inovasi pengolahan hasil pertanian di Nusa Tenggara Barat (NTB) relatif rendah yang mengakibatkan akses petani terhadap informasi inovasi teknologi rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurang berfungsinya modal sosial dalam proses adopsi inovasi (Puspadi *et al.*, 2005). Informasi sangat penting sebagai basis tindakan, sehingga melalui modal sosial (*social capital*) petani dapat mengakses langsung informasi inovasi melalui jaringan komunikasi dan kerjasama. Modal sosial (*social capital*) sangat penting dipahami agar dapat mengetahui bagaimana rumah tangga petani dapat mengakses informasi inovasi, melakukan tindakan kolektif, mengadopsi, dan memperoleh keuntungan dari inovasi yang digunakan (Badan Litbang Pertanian, 2004; Brata, 2004; dan Suharto, 2005).

Jumlah kelompok tani tanaman pangan dan perkebunan di NTB mencapai 1.786 kelompok. Jumlah kelompok ternak sapi yang terorganisir dalam kandang kolektif yang memperoleh bantuan program Sarjana Membangun Desa dari pembiayaan APBN dan APBD kabupaten dan propinsi NTB dari tahun 2008 – 2012 mencapai 182 kelompok dengan nilai investasi Rp 54,6 M. Populasi ternak sapi yang relatif banyak di propinsi Nusa Tenggara Barat, sekitar 780.000 ekor pada tahun 2012 merupakan hasil peternakan rakyat yang didukung berbagai program percepatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain melalui kegiatan yang spiritnya adalah Percepatan, Inovasi dan Nilai tambah (PIN) yang dikenal dengan program "Bumi Sejuta Sapi" (BSS). Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa masyarakat / peternak adalah partisipan utama dan berperan sangat penting dalam menentukan perkembangan populasi ternak sapi di daerah ini. Walaupun pengetahuan dan pengalaman beternaknya dapat dikatakan sudah cukup banyak, namun karena berbagai kendala, masih belum mampu mewujudkan potensi (produksi) optimal ternak sapi yang dipeliharanya.

Mulai tahun 2008 hingga tahun 2013 Kementrian Pertanian telah melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) pada 899 Gapoktan dari 1.134 desa/kelurahan di NTB yang telah menerima BLM PUAP dengan total nilai investasi mencapai Rp 89,9 M (Wahyu, *et al*, 2012). Program-program pemerintah pusat maupun daerah tersebut yang dilakukan oleh pemerintah daerah mempunyai relevansi terhadap pengembangan pertanian di daerah. Pelaksanaan program PUAP yang hampir terdapat disemua desa/kelurahan di NTB belum mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan agribisnis di wilayah perdesaan.

Harapan pemerintah dengan adanya PUAP ini dapat mendorong tumbuhnya usaha agribisnis baru di pedesaan sekaligus dapat meningkatkan kinerja dan fungsi Gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani. Gapoktan diharapkan dapat mengelola dana stimulan PUAP sebagai modal usaha untuk sebesar-besarnya kepentingan petani.

Pelaksanaan PUAP berbasis desa pertanian miskin merupakan program terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja di pedesaan. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan sasaran kelembagaan tani pelaksana PUAP

penyalur modal usaha agribisnis bagi petani/peternak. Diharapkan Gapoktan sebagai basis program PUAP dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa.

Kegiatan pengkajian melakukan terintegrasi dengan program pembangunan di daerah dengan melakukan pendampingan kelembagaan tani agar program tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya bagi petani. Bulu, *et al* (2012) melaporkan bahwa kinerja pelaksanaan program pembangunan daerah seperti PUAP, SMD, BANSOS ternak sapi, PIJAR dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) belum optimal yang disebabkan oleh proses pendampingan kelembagaan tani yang relatif rendah. Proses dan pendampingan kelembagaan tani yang belum optimal dalam pelaksanaan program merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kinerja program pembangunan menjadi rendah.

Program-program tersebut berbentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani dan peternak. Program-program tersebut bertujuan untuk: *pertama*, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis pertanian di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah. *Kedua*, meningkatkan kemampuan kelembagaan tani dalam usaha agribisnis dan pengembangan jaringan kerjasama dengan pelaku usaha agribisnis lainnya. *Ketiga*, memberdayakan kelembagaan petani dalam pengembangan ekonomi di perdesaan untuk melalui kegiatan usaha agribisnis. *Keempat*, memperkuat kelembagaan tani dalam membangun kemitraan dengan lembaga keuangan formal dalam akses permodalan usaha. *Kelima*, melalui kegiatan usaha agribisnis akan menumbuhkan dan memperkuat modal sosial antara kelembagaan tani dengan pelaku agribisnis lainnya dalam kemitraan agribisnis.

Semua program pembangunan pertanian perdesaan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bahwa sasarannya adalah kelembagaan tani dalam menggerakkan usaha agribisnis di perdesaan. Pelaksanaan program sebenarnya dirancang dan dilaksanakan secara integrasi dengan kegiatan atau program yang telah ada. Kelemahan utama dalam penyelenggaraan program pembangunan pertanian yang dilakukan lintas kementerian adalah lemahnya koordinasi, sosialisasi, dan sinkronisasi program. Meskipun program pembangunan pertanian telah dilaksanakan secara integrasi, namun tidak diikuti oleh pendampingan sehingga kegiatan pemberdayaan kelembagaan tani pada level mikro belum dilakukan secara optimal.

### **PERMASALAHAN PENGUATAN KELEMBAGAAN TANI**

Program pembangunan pertanian yang dilakukan di daerah umumnya dilakukan oleh kelembagaan tani. Program pembangunan pertanian yang dilakukan lebih banyak terfokus pada pengembangan agribisnis perdesaan belum menunjukkan perubahan yang berarti terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Pengembangan diversifikasi pangan melalui penerapan teknologi pasca panen hasil pertanian sebenarnya berpeluang besar terhadap pengembangan usaha agribisnis di perdesaan.

Pelaksanaan program pembangunan pertanian di perdesaan yang berbasis pengembangan ekonomi wilayah pedesaan yang dominan dilakukan oleh kelembagaan tani belum diikuti melalui pendampingan kelembagaan tani sebagai upaya dalam pemberdayaan kelembagaan tani.

Pendampingan kelembagaan tani yang relatif rendah dan kurang efektif dalam pelaksanaan setiap program pembangunan pertanian di perdesaan merupakan faktor utama yang menyebabkan pelaksanaan program pembangunan ekonomi di perdesaan belum mencapai sasaran yang diharapkan.

Kedekatan pendamping (SMD, PMT) maupun penyuluh dengan kelembagaan tani (kelompok tani dan Gapoktan) yang dibina, baik jarak lokasi tempat tinggal maupun frekwensi kunjungan ke kelompok, sangat menentukan keberhasilan pembinaan dan pendampingan. Tempat tinggal pendamping (SMD, PMT) maupun penyuluh yang sebagian besar tidak berdomisili dengan lokasi kelompok tani - ternak/Gapoktan yang dibina. Kondisi ini menyebabkan intensitas kunjungan pendamping maupun penyuluh pada kelompok tani ternak hanya sekali dalam satu bulan.

Frekuensi kunjungan pendamping maupun penyuluh dalam melakukan pendampingan kelembagaan tani menyebabkan kegiatan pemberdayaan relatif rendah. Kegiatan pemberdayaan kelembagaan tani dalam berbagai kegiatan usahatani termasuk usaha agribisnis pertanian relatif rendah.

Pembinaan yang diberikan kepada penyuluh, dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) berupa pertemuan rutin dalam rangka penyusunan program, persiapan pelaksanaan, pemantauan pelaksanaan serta evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh BP4K Kabupaten / Kota. Selain itu memberikan kesempatan kepada para penyuluh untuk mengikuti beberapa pelatihan yang berkaitan dengan tugasnya, namun pelatihan ini jumlahnya masih sangat terbatas. Yang lebih menarik lagi adalah bahwa pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh para penyuluh, tidak secara khusus diarahkan untuk pengembangan diversifikasi pangan dan agribisnis pada kelembagaan tani tetapi lebih bersifat umum, yaitu ke arah manajemen kelompok petani. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembinaan pendamping / penyuluh ini tidak untuk pengembangan usaha agribisnis kelembagaan tani, melainkan pengembangan usaha tani dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Latar belakang keilmuan oleh sebagian besar pendamping dan penyuluh kurang sesuai dengan kebutuhan kelompok tani ternak, merupakan persoalan lain yang sangat menghambat dalam meraih tingkat keberhasilan pemberdayaan yang diharapkan. Kurangnya fasilitas pendukung yang dimiliki oleh penyuluh, sangat menghambat mobilitas dan intensitas kunjungan pendampingan kelompok tani ternak. Dalam kondisi seperti ini maka efektivitas pendampingan bagi kelompok tani ternak akan sulit diharapkan. Konsentrasi pemberdayaan yang tidak fokus kepada kelembagaan tani selaku pelaksana program pembangunan, menyebabkan tidak optimalnya pemberdayaan.

Strategi dan pendekatan yang terbatas dalam melakukan pemberdayaan kelembagaan tani menyebabkan penguatan modal sosial kelembagaan tani relatif lemah. Meskipun konsep, strategi dan pendekatan pemberdayaan kelembagaan tani telah dirumuskan secara baik oleh para ahli/ilmuwan dan pengambil kebijakan, namun dalam penerapannya masih sangat perlu disesuaikan dengan kondisi kelembagaan tani, baik dari aspek antropologis, sosiologis, psikologis dan

ekonomi. Ke empat aspek tersebut, sangat jarang dipertimbangkan oleh para ahli dalam merumuskan pendekatan pemberdayaan kelembagaan tani. Jika seseorang fasilitator tidak memahami petani dari ke empat aspek tersebut maka relatif sulit untuk menumbuhkan dan memperkuat modal sosial kelembagaan tani.

Berbagai kasus dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian bahwa kelembagaan tani sebagai penerima program sebelumnya tidak dipersiapkan dengan baik. Hampir 80 % dari 899 Gapoktan penerima BLM PUAP dan 32 % dari 182 kelompok ternak sapi penerima program SMD di NTB dibentuk secara dadakan, hanya sebagai prasyarat agar layak untuk menerima bantuan program (Kukuh, *et al.* 2011 dan Bulu, *et al.* 2012. Kelembagaan tani yang dibentuk hanya sebagai persyaratan penerima program memiliki modal sosial yang sangat rendah, bahkan memiliki tingkat kerusakan modal sosial sangat tinggi. Modal sosial yang lemah akan mempengaruhi penerapan dan pengembangan inovasi teknologi serta usaha agribisnis.

Dana PUAP yang mengalir di masyarakat petani di NTB dari tahun 2008 - 2012 berjumlah Rp. 98,3 M (sudah termasuk pendapatan hasil usaha) yang dilakukan Gapoktan dari modal PUAP sebesar Rp. 89,9 M. Kinerja pengembangan usaha agribisnis yang dilakukan Gapoktan melalui program PUAP sampai dengan tahun 2012 hanya mencapai Rp 8,4 M (9,35 %) dari 899 Gapoktan. Perkembangan pengelolaan dana dalam kegiatan agribisnis yang dilakukan oleh Gapoktan sampai dengan tahun 2012 menunjukkan bahwa saldo Kas sebesar Rp. 7,8 M, saldo Bank sebesar Rp. 11,8 M, piutang Rp. 52,85 M, dan tunggakan sebesar Rp. 13,7 M. Jumlah tunggakan yang belum dikembalikan oleh anggota ke Gapoktan termasuk sejumlah Gapoktan yang masalah serius dalam penggunaan dana PUAP.

Masalah yang dihadapi dalam pemberdayaan kelembagaan tani pelaksana program pembangunan pertanian, yaitu kemampuan fasilitator atau pendamping dan sumberdaya manusia pada kelembagaan tani (kelompok tani/Gapoktan) relatif rendah terutama dalam pengembangan diversifikasi pangan dan bentuk-bentuk usaha agribisnis serta jaringan kerjasama agribisnis.

Pengetahuan, sikap dan motivasi anggota kelompok tani maupun anggota Gapoktan masih rendah sehingga tingkat kreatifitas dalam pengembangan usaha agribisnis kurang optimal. Hal ini juga sangat terkait dengan modal sosial kelembagaan tani yang rendah. Sebagai contoh, beberapa Gapoktan yang menerima program LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) di NTB yang merupakan program pemerintah daerah dalam distribusi pangan, peningkatan ketahanan pangan dan nilai tambah bagi anggota kelompok tani belum dilakukan secara optimal.

## **PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

Beberapa program pemerintah daerah propinsi Nusa Tenggara Barat yang terkait dengan reitalisasi pertanian dan kemandirian pangan, yaitu program PIJAR (Sapi, Jagung dan Rumput laut) meruakan program dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Program ini masih memfokuskan pada peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam jagung dan peningkatan produktivitas ternak sapi. Pelaksanaan program PIJAR belum dilakukan secara optimal terutama dalam penerapan teknologi masih rendah. Perkembangan luas areal tanam dan meningkatnya



petani yang menanam jagung sampai ke kabupaten Dompu dan Bima didorong oleh perkembangan pasar terhadap permintaan jagung yang semakin tinggi.

Penerapan teknologi jagung yang dilakukan petani belum optimal, tidak sedikit petani menggunakan benih jagung yang disimpan sendiri dari hasil panen sebelumnya merupakan varietas jagung hibrida turunan. Penggunaan benih jagung hibrida turunan yang disimpan sendiri oleh petani memiliki tingkat produktivitas yang sangat rendah. Sementara ketersediaan benih jagung komposit bagi petani lahan kering terutama di pulau Sumbawa sangat terbatas.

Peningkatan nilai tambah melalui penggunaan teknologi pasca panen relatif rendah, hal ini ditunjukkan bahwa sebagian besar petani jagung di NTB masih menjual jagung dalam bentuk tongkol kering panen dengan harga Rp 1.250 /kg. Penerapan teknologi pasca panen jagung yang rendah disebabkan oleh pembinaan dan pendampingan teknologi yang kurang efektif melalui program penyuluhan yang dilakukan oleh BAKORLUH propinsi dan BP4K di tingkat kabupaten/kota.

Jika dikaitkan dengan program dari BAKORLUH yang meliputi: program pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Tani, program pemberdayaan kelembagaan tani, dan program peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan. Program yang dilakukan oleh lembaga penyuluhan mulai dari tingkat propinsi sampai tingkat kecamatan dan desa sebenarnya berperan aktif dalam pendampingan teknologi pada kelembagaan tani. Kenyataan ini ditunjukkan oleh tingkat penerapan teknologi belum sesuai dengan sasaran pelaksanaan program dan kebutuhan petani. Upaya-upaya peningkatan nilai tambah melalui pendampingan penerapan teknologi oleh lembaga penyuluhan belum dilakukan secara maksimal. Sumberdaya manusia tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) di NTB yang rata-rata umur 50 tahun ke atas merupakan salah satu kendala di dalam pelaksanaan program penyuluhan. Beberapa kendala yang dihadapi lembaga penyuluhan di NTB dalam penyelenggaraan penyuluhan sebagai berikut: *Pertama*, keterampilan dan kompetensi penyuluh tidak berkembang sesuai perkembangan inovasi/teknologi yaitu sebagai akibat terbatasnya upaya-upaya peningkatan kapasitas penyuluh. *Kedua*, Usia penyuluh sebagian besar > 50 tahun, sementara alokasi pengangkatan/rekrutmen tenaga penyuluh baru sangat terbatas. *Ketiga*, kelembagaan penyuluhan di kabupaten/kota dan kecamatan belum sepenuhnya mengacu pada UU No. 16/2006. *Keempat*, anggaran yang dialokasikan untuk mendukung operasional penyelenggaraan dan penyediaan sarana/prasana penyuluhan sangat terbatas. *Kelima*, program penyuluhan masih bersifat parsial, belum disusun sebagai mana ketentuan Permentan 25/2009 dan belum dijadikan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan. *Keenam*, sistem kerja LAKUSI belum diberjalan secara optimal (Bakorluh Propinsi NTB, 2012). Berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 2013 BAKORLUH akan menyelenggarakan program peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan agar mampu menyesuaikan perkembangan inovasi teknologi dalam melakukan pendampingan kelembagaan tani. Sasaran utama program tersebut meliputi: 1) Mampu memberi motivasi, bimbingan dan bantuan kepada petani dalam memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga petani ahli di bidang usaha pokoknya, 2) membangun kepemimpinan petani, 3) memperkuat kemampuan manajerial petani, 4) Membangun jiwa kewirausahaan petani, 5) menumbuhkan dan memperkuat kelembagaan petani.

Badan Ketahanan Pangan propinsi NTB telah melaksanakan program yang terkait dengan revitalisasi pertanian dan kemandirian pangan, yaitu melalui program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Program ini telah dilaksanakan mulai tahun 2012 dan akan berlanjut pada tahun 2013. Tujuan program tersebut memfokuskan pada kegiatan memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Sasaran pokok dari pelaksanaan program tersebut adalah peningkatan ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan.

Fokus kegiatan Badan Ketahanan pangan (BKP) tahun 2013 meliputi: *Pertama*, Penurunan konsumsi beras 1,5 % per tahun dan Peningkatan skor PPH 91,5 pada tahun 2013, dilakukan melalui Pengembangan KRPL dan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L). Kegiatan aksi yang dilakukan adalah Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Kegiatan ini bertujuan mempercepat terwujudnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan menyediakan kebun bibit desa di 50 desa dan optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebanyak 82 desa melalui pembiayaan APBN. Di samping itu, melalui pembiayaan APBD, melakukan pengembangan 20 Kelompok Pekarangan, pengembangan Bisnis Pangan Lokal, pengenalan Beras Pintar, serta pengembangan Gerai Pangan Lokal. *Kedua*, Menjaga stabilitas harga beras/jagung di tingkat petani dengan mengembangkan LDPM (Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat). Kegiatan ini telah dilakukan pada tahun 2012 dan telah terintegrasi dengan kegiatan M-P3MI dan PUAP. Kegiatan LDPM bertujuan untuk mendukung stabilisasi harga gabah di tingkat petani pada saat panen raya dan cadangan pangan masyarakat melalui jual beli gabah, penyediaan pangan melalui sistem Resi Gudang, distribusi, dan pengolahan gabah menjadi beras sebagai upaya peningkatan nilai tambah. Sasaran pengembangan kegiatan ini baru 15 Gapoktan. Kegiatan ini belum dilakukan secara optimal yang disebabkan oleh pendampingan yang kurang efektif. *Ketiga*, meningkatkan akses pangan pokok masyarakat untuk penanganan kerawanan pangan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan akses pangan masyarakat di daerah rawan pangan dengan sasaran 48 lumbung pangan di kelembagaan Gapoktan melalui pembiayaan APBN. Melalui pembiayaan APBD juga dikembangkan lumbung pangan sebanyak 210 lumbung pangan, yaitu masing-masing 50 lumbung pangan modern dan 160 lumbung pangan tradisionnal. Keempat, pembinaan terhadap Desa Mandiri Pangan yang telah ditumbuhkan di 10 Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pangan rumah tangga miskin di desa rawan pangan pada 229 desa (BKP Propinsi NTB, 2012).

Program BSS (Bumi Sejuta Sapi) dari Dinas Peternakan melalui pembiayaan APBN dan APBD. Tujuan program ini adalah peningkatan populasi ternak sapi melalui penerapan teknologi dan pengembangan agribisnis. Kegiatan ini melalui program Sarjana Membangun Desa (SMD) telah dilakukan sejak tahun 2008 hingga tahun 2012 sudah menyalurkan bantuan sosial pada 182 kelompok ternak sapi dengan rata-rata nilai bantuan sosial sebesar Rp 300.000.000,-/kelompok.

Sasaran pelaksanaan program ini adalah kelompok ternak sapi kolektif. Pelaksanaan program BSS ini belum optimal di mana tingkat penerapan teknologi masih rendah. Sementara rata-rata kematian pedet selama pendampingan oleh SMD pada kelompok ternak mencapai 17 %. Kendala utama dalam pelaksanaan program ini adalah Komunikasi antara SMD dengan Dinas Peternakan selaku Tim Teknis dalam program SMD relatif rendah sehingga mempengaruhi proses pendampingan kelembagaan ternak oleh SMD. Hampir sebagian besar pendamping (SMD) memiliki keterbatasan strategi, pendekatan dan pengalaman dalam melakukan pemberdayaan kelompok ternak serta penguasaan teknologi dan materi untuk melakukan pendampingan relatif masih sangat kurang. Proses dan pendampingan kelembagaan ternak sapi oleh pendamping SMD yang kurang efektif menyebabkan tingkat penerapan teknologi dan produktivitas ternak sapi relatif rendah (Bulu, 2012).

Dinas Perkebunan propinsi Nusa Tenggara Barat juga telah melaksanakan program peningkatan produksi dan produktivitas mutu tanaman, program peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran hasil pertanian. Program ini memiliki keterkaitan dengan revitalisasi pertanian dan kemandirian pangan. Kebijakan pembangunan perkebunan melalui pelaksanaan program tersebut antara lain melakukan kegiatan peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan terutama tanaman kakao dan kopi. Peremajaan tanaman kakao dilakukan pengembangan tanaman kakao unggul SE, sedangkan kegiatan rehabilitasi tanaman dilakukan pada tanaman kopi melalui sambung pucuk. Pelaksanaan program tersebut belum optimal yang disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya manusia. Pendampingan teknologi yang dilakukan penyuluh maupun pendamping Gernas relatif sangat jarang dilakukan sehingga menyebabkan tingkat penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan rendah. Pendampingan kelembagaan tani dalam peningkatan nilai tambah melalui penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil juga sangat rendah. Keterampilan tenaga penyuluh perkebunan maupun tenaga pendamping Gernas dalam melakukan rehabilitasi tanaman melalui sambung pucuk kopi dan sambung samping kakao sangat rendah.

Keberhasilan dan keberlanjutan pelaksanaan program pembangunan nasional dan daerah yang semuanya dilakukan di daerah adalah ditentukan oleh energi sinergisme instansi terkait dengan menempatkan program kegiatannya masing-masing ke dalam bagian integral pembangunan dalam pengembangan suatu wilayah. Sinergisme antar instansi tersebut diperlukan dalam upaya pembentukan jejaring kerja terpadu dalam pelayanan. Atas dasar itu, maka supaya tercapai keterpaduan tindakan dalam pembentukan jejaring kerja terpadu mutlak perlu dilakukan koordinasi.

Sejauh ini integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan di daerah masih jauh dari harapan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program pembangunan yang mempunyai sasaran pembinaan pada kelembagaan tani kurang optimal. Koordinasi dan sinkronisasi program merupakan kendala utama dalam pelaksanaan program pembangunan berbasis pengembangan ekonomi perdesaan. Bila disadari bahwa koordinasi merupakan azas pokok dari setiap organisasi/lembaga/instansi dalam pelaksanaan program pembangunan pada sasaran pembangunan yang sama. Setiap organisasi yang terdiri dari bagian-bagian atau unit

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dituntut untuk menerapkan koordinasi dalam melaksanakan berbagai kegiatan menuju tercapainya tujuan yang dikehendaki. Ini berarti bahwa meskipun dalam setiap organisasi masing-masing bagian atau unit memiliki tugas dan fungsi sendiri berdasarkan spesialisasi tetapi pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang utuh (sistem) karena itu untuk menjamin terlaksananya segala kegiatan secara terarah menuju tercapainya tujuan bersama, maka koordinasi mutlak dilaksanakan terlebih pada perencanaan pembangunan di daerah.

Penyusunan rencana pembangunan daerah harus dapat untuk menampung kenyataan dan menjawab tantangan akan adanya kaitan hubungan antar sektor yang satu dengan lainnya. Keadaan demikian karena adanya kenyataan banyaknya ketergantungan dan hubungan antar sektor, maka diperlukan adanya mekanisme dalam pengaturan tanggungjawab atas penyusunan rencana lintas sektoral di daerah, yaitu untuk menjamin adanya kesesuaian dan keseimbangan bagi program-program yang dilaksanakan oleh berbagai sektor dan subsektor dalam suatu daerah.

Kendala utama tidak tercapainya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan di daerah oleh organisasi/Dinas/instansi terkait disebabkan oleh modal social yang rendah. Rendahnya jaringan kerjasama dan saling kepercayaan yang merupakan komponen modal social dalam integrasi pelaksanaan program pembangunan merupakan suatu titik kelemahan dalam pelaksanaan pembangunan.

## **UPAYA-UPAYA DAN LANGKA KEBIJAKAN YANG PERLU DITEMPUH**

Kelembagaan tani memiliki sumber daya manusia atau modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) yang rendah dalam penerapan teknologi dan usaha agribisnis usahatani di perdesaan. Kedua komponen utama tersebut sangat perlu dipelajari secara mendalam agar mampu menemukan strategi dan pendekatan dalam melakukan pemberdayaan dan penguatan modal sosial kelembagaan tani. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi wilayah salah satunya pengembangan diversifikasi pangan dan agribisnis yang sasaran pelaksanaan kegiatan pada kelembagaan tani, maka seharusnya bahwa sebelum pelaksanaan program terlebih dahulu mempersiapkan kelembagaan tani secara matang. Pengalaman selama ini seperti pelaksanaan program PUAP bahwa kelembagaan tani belum dipersiapkan dengan baik. Bukan rahasia umum lagi, bahwa yang dipikirkan oleh pengambil kebijakan atau pemangku kepentingan adalah bagaimana mempercepat proses penyerapan anggaran pembangunan. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar kelembagaan tani (Gapoktan dan Poktan) memiliki kerusakan modal sosial. Untuk memperbaiki modal sosial kelembagaan tani yang rusak membutuhkan proses dan waktu yang agak lama. Berkaitan dengan hal tersebut maka kendala yang dihadapi dalam pengembangan modal sosial untuk diversifikasi pangan dan agribisnis di perdesaan adalah: (1) kelembagaan tani yang diberikan bantuan hibah melalui kegiatan pemberdayaan tanpa melakukan suatu pendampingan maka kelompok tani mempunyai pemikiran bahwa pemerintah akan memberikan bantuan lagi. Kelompok tani yang mempunyai

pemikiran tersebut akan relatif lambat untuk mengembangkan dan memperkuat modal sosial; (2) sumberdaya manusia pada kelembagaan tani yang relatif rendah; (3) pengetahuan dan pengalaman fasilitator maupun penyuluh yang rendah dalam melakukan pemberdayaan dan pendampingan kelembagaan tani; (4) pemberdayaan kelembagaan tani untuk pengembangan diversifikasi pangan dan agribisnis yang tidak diikuti dengan suatu aksi nyata yang memberikan manfaat bagi kelembagaan tani akan relatif sulit untuk membangun kepercayaan; dan (5) Pembinaan dan pendampingan kelembagaan tani yang tidak berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan pembangunan di daerah yang berbasis pengembangan ekonomi wilayah perdesaan maka perlu dicermati bahwa modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) merupakan dua konsep yang berbeda, namun keduanya merupakan dua kutub yang saling melengkapi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Komponen-komponen modal manusia yang meliputi: pengetahuan, pengalaman, keterampilan, motivasi, dan sikap, yang mana komponen-komponen tersebut merupakan karakteristik psikologi yang melekat pada individu. Peningkatan kemampuan modal manusia dilakukan melalui program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan tani. Menurut Ancok (2007) bahwa modal manusia adalah bagian dari proses yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga bersifat afektif. Untuk memperkuat pendapat Ancok tersebut di atas maka perlu dilengkapi dengan menambahkan aspek konatif, yaitu jika aspek kognitif dan aspek afektif seseorang terpenuhi maka akan cenderung bertindak untuk membangun jaringan dan melalui hubungan sosial akan terbentuk jaringan kerjasama. Dengan demikian modal sosial muncul dari hasil kerjasama antar individu maupun kelompok tani/Gapoktan. Oleh karena itu pembentukan modal manusia hanya bisa dilakukan dengan efektif apabila melibatkan sejumlah orang yang bekerjasama dalam sebuah kelompok tani/Gapoktan. Hubungan antara modal manusia dengan modal sosial dapat dijelaskan melalui teori organisasi modern, bahwa di dalam kerjasama antara individu maupun kelompok diawali melalui hubungan sosial, yang mana modal manusia berperan penting dalam menciptakan hubungan sosial dan kerjasama. Modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma dan saling kepercayaan yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama. Menurut Cohen dan Prusak (2001), modal sosial adalah kumpulan dari hubungan yang aktif di antara manusia: rasa percaya, saling pengertian dan kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota kelompok dalam sebuah jaringan kerja antara komunitas yang memungkinkan adanya kerjasama.

Kelembagaan penyuluhan dimana penyuluh merupakan tenaga pendamping bagi pelaku utama (kelembagaan tani) mempunyai peran pokok sebagai motivator, pembina, pembimbing, fasilitator serta advisor (penasehat). Namun perlu mencermati bahwa di dalam memberikan motivasi kelembagaan tani dalam penerapan teknologi dan usaha agribisnis bahwa motivasi merupakan energi bagi bekerjanya modal sosial dalam pemenuhan kebutuhan individu maupun kelompok. Jika diamati lebih jauh bahwa beberapa komponen modal sosial (*social capital*), seperti saling kepercayaan dan norma adalah bekerja pada ranah psikologis individu. Demikian pula faktor modal manusia, yaitu beberapa komponen sikap dan motivasi bekerja pada ranah

sosiologis. Senada dengan temuan Schuller (2001), menyatakan bahwa terdapat hubungan komplementer secara positif antara modal manusia dengan modal sosial.

Perbedaan mendasar antara modal manusia dan modal sosial, yaitu modal manusia lebih memfokuskan pada perilaku individu dalam kegiatan produktif, sedangkan modal sosial lebih mengarahkan perhatian pada hubungan dan jaringan yang dibentuk oleh individu maupun kelompok. Meskipun terdapat perbedaan mendasar antara modal manusia dan modal sosial, namun keduanya merupakan dua kutub yang saling melengkapi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Senada dengan pernyataan Portes (1998) dan Schuller (2001), memandang modal manusia dan modal sosial merupakan dua potensi yang saling melengkapi. Dengan demikian dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) tidak dapat dilakukan secara terpisah antara modal sosial dan modal manusia melainkan dapat dilakukan secara terpadu.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan terutama dalam pengembangan diversifikasi pangan dan agribisnis perdesaan di daerah diperlukan kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan modal sosial kelembagaan tani dalam penerapan teknologi, pengembangan diversifikasi pangan dan usaha agribisnis. Kebijakan tersebut tidak hanya menciptakan suatu prangkat modal sosial dalam pelaksanaan program pembangunan, namun harus dilakukan secara baik untuk menciptakan kelembagaan tani yang mandiri. Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan modal sosial kelembagaan tani sangat perlu di dukung oleh pendampingan secara intensif. Pendampingan dan pemberdayaan kelembagaan tani bahwa pihak pendamping hanya terbatas dalam memfasilitasi dengan tanpa merombak sistem sosial yang ada.

Keberhasilan program-program pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh koodinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program. Sejumlah program pembangunan daerah dari masing-masing instansi terkait yang mempunyai tujuan dan sasaran yang sama masih dilakukan secara parsial atau dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing instansi terkait. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kebijakan dalam koordinasi dan integrasi pelaksanaan program pembangunan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: (1) mengadakan pertemuan resmi antara unit-unit organisasi/instansi terkait mengenai pelaksanaan program yang harus dikoordinasikan. Dalam pertemuan ini, dibahas dan diadakan pertukaran pikiran dan sinkronisasi kegiatan dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan agar dapat berjalan selaras dalam mencapai tujuan program pembangunan, (2) mengangkat suatu tim atau panitia koordinator yang khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi, (3) membuat buku pedoman yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing unit/organisasi/instansi terkait dan diberikan kepada setiap unit/organsisasi/instansi terkait untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas masing-masing, serta (4) pimpinan atau atasan mengadakan pertemuan-pertemuan informal dengan bawahannya dalam rangka pemberian tugas, konsultasi dan pengarahan dalam pelaksanaan program secara integrasi (Manullang, 1992). Dengan adanya berbagai jenis dan cara-cara koordinasi tersebut, diharapkan proses koordinasi dapat dilaksanakan secara efektif sehingga tercapai kesatuan arah dan tindakan dari berbagai unit

organisasi yang pada gilirannya bersama-sama bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan yang dikehendaki bersama.

## P E N U T U P

Untuk meningkatkan kapasitas petani dan kelompoknya dalam adopsi inovasi pertanian diperlukan revitalisasi modal sosial melalui penguatan modal sosial di tingkat mikro (kelembagaan tani). Penguatan modal sosial dapat ditempuh dengan memanfaatkan nilai dan pengetahuan lokal yang telah dipraktekkan oleh petani dan kelompoknya sehingga revitalisasi modal sosial tidak mencabut akar kerjasama petani dan kelompok tani. Nilai-nilai dan pengetahuan lokal seyogyanya sebagai penggerak, strategi dan pendekatan serta sebagai rumusan operasional dalam proses revitalisasi kelembagaan pertanian terutama dalam mewujudkan jaringan kerjasama yang berorientasi pada pengembangan diversifikasi pangan dan agribisnis di perdesaan.

Untuk mengatasi keterbatasan biaya usahatani bagi petani lahan kering maupun petani lahan sawah maka sangat perlu dilakukan penumbuhan permodalan kelembagaan tani atau kelompok tani dengan menghimpun dana melalui iuran bulanan dan tabungan anggota. Penumbuhan permodalan kelembagaan tani (Gapoktan dan kelompok tani) dapat dilakukan melalui pendekatan modal sosial serta pendampingan melalui pendekatan kohesif dengan tanpa merubah tatanan sosial masyarakat tani yang sudah ada. Bagi Gapoktan dan anggotanya yang telah mengelola dana PUAP dan kegiatan LDPM diperlukan penguatan modal sosial dalam pengembangan agribisnis melalui jaringan kerjasama.

Untuk mengatasi ketahanan pangan di lahan kering dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas kelompok dalam penerapan teknologi dan usaha agribisnis. Agar kegiatan ini dapat tercapai maka dapat dilakukan dengan membangun kerjasama antar kelompok tani di kelompok tani lahan kering dalam pengembangan teknologi yang mampu meningkatkan nilai tambah dan menggerakkan agribisnis. Penangkaran benih jagung komposit di lahan kering yang diintegrasikan dengan pemeliharaan ayam KUB merupakan salah satu betuk agribisnis di perdesaan lahan kering yang perlu dipertimbangkan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan untuk mengembangkan komunikasi dan kerjasama, namun perlu juga difasilitasi oleh institusi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang pengkajian terapan dan lembaga penyuluhan.

Untuk meningkatkan penggunaan inovasi pertanian hasil penelitian dan pengkajian dari institusi penelitian pemerintah maka diperlukan melakukan reorientasi nilai dari pengkajian berbasis teknis ke arah pengembangan agribisnis sehingga kelembagaan tani dan anggotanya dapat memperoleh nilai tambah melalui penerapan teknologi yang menguntungkan. Untuk itu diperlukan peningkatan pelayanan mutu inovasi teknologi untuk memperkuat keyakinan/kepercayaan petani melalui percepatan desiminasi inovasi teknologi sehingga mendorong peningkatan penggunaan inovasi hasil penelitian/pengkajian dari institusi penelitian pemerintah.

Pengembangan usaha agribisnis perdesaan melalui program PUAP harus didukung oleh modal sosial (*social capital*) yang kuat mulai dari level makro sampai level mikro. Jaringan komunikasi dan kerjasama dalam kegiatan ekonomi produktif (usaha agribisnis) pada level mikro (Gapoktan) harus didukung oleh saling kepercayaan dan norma atau aturan yang disepakati bersama. Indikator-indikator saling kepercayaan yang harus diperkuat di tingkat kelembagaan tani (Gapoktan dan Poktan) dalam pengembangan diversifikasi pangan dan usaha agribisnis adalah berperilaku jujur, saling menghargai, saling menghormati, saling terbuka, saling mengingatkan, dan saling memberi informasi.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian masih rendah menyebabkan tingkat adopsi inovasi masih rendah, sehingga perlu dilakukan pengembangan kapasitas lembaga penyuluhan dalam memotivasi dan menumbuhkan kerjasama kelompok melalui proses dialogis. Penyuluh pertanian perlu memahami kebutuhan petani sebagai patner dengan mengutamakan kesetaraan dalam menumbuhkan kerjasama sehingga petani akan mengalami proses belajar untuk memperbaiki diri sendiri.

Kelembagaan pada tingkat mikro (Gapoktan/kelompok tani) merupakan basis berkembangnya modal sosial dari bawah, sehingga perlu diperkuat karena berpotensi menjadi penggerak pembangunan sosial dan ekonomi di perdesaan. Penguatan modal sosial perlu difasilitasi untuk penguatan jaringan komunikasi dan kerjasama yang dilakukan tidak hanya kerjasama antar kelompok tani, melainkan juga kerjasama dengan pihak swasta atau pemangku kepentingan lain, seperti lembaga keuangan formal (Bank) dan lembaga keuangan non formal, perusahaan dan distributor sarana produksi, serta pengusaha pengolahan hasil pertanian.

Pelaksanaan program pembangunan di daerah yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait secara parsial tidak menjamin tercapainya keberhasilan pembangunan pada sasaran pembangunan yang sama. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program pembangunan di daerah perlu dipertimbangkan untuk dioperasionalkan secara nyata untuk pencapaian sasaran dan tujuan yang diharapkan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, D. 2007. Konsep Modal Manusia. Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta. <http://ancok.staff.ugm.ac.id>.
- Bulu, Y. G., 2011. Kajian Pengaruh Modal Sosial dan Keterdedahan Informasi Inovasi Terhadap Tingkat Adopsi Inovasi Jagung di Lahan Sawah dan Lahan Kering di Kabupaten Lombok Timur. Disertasi. Sekolah Pascasarjana. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Bulu, Y. G., Ketut Puspadi, Kukuh Wahyu, 2012. Model Pengembangan Pertanian Perdesaan Melalui Inovasi (MP3MI) Berbasis Usaha Agribisnis Pertanian di NTB. Laporan Akhir Kegiatan. BPTP NTB.
- Bulu, Y. G., 2012. Peningkatan Populasi Ternak sapi Melalui Pendampingan SMD Mendukung Agribisnis Peternakan di Nusa Tenggara Barat. Makalah diseminarkan dalam Seminar Nasional Kerjasama antara Menristek dengan Pemerintah Daerah Propinsi Nusa



- Tenggara Barat, Mataram Tanggal 11 Desember 2012 (sedang dalam proses percetakan Prosiding).
- Kukuh, W., Irma Mardian, Putu Cakra, dan Yul Alfian, 2011. Pendampingan Teknologi dan Superfisi Pelaksanaan Program PUAP di NTB. Laporan Tahunan. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB. Mataram.
- Kukuh, W., Dwi Praptomo, Putu Cakra, dan Mardiana, 2012. Pendampingan Teknologi dan Superfisi Pelaksanaan Program PUAP di NTB. Laporan Evaluasi Kegiatan Gapoktan. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB . Mataram.
- Cohen, D., and L. Prusak. 2001. *In Good Company: How Social Capital Makes Organization Work*. London: Harvard Business Pres. In Malloch, Th.R. (2003). *Social, Human and Spiritual Capital in Economic Development*. Templeton Foundation, Working Group of the *Spiritual Capital Project* Harvard University. <http://www.spiritual.capitalresearchprogram.com>.
- Cote, S. 2001. *The Contribution of Human and Social Capital*. Canadian Journal of Policy Research, Vol.22, No. 1, (March 2001). [www.oacd.ceri.article](http://www.oacd.ceri.article). <http://www.google.com>.
- Portes, A. 1998. *Social capital: its origins and applications in modern sociology*, Annual Review of Sociology 24: 1-24. Departement of Sociology Pricenton, New Jersey 08540. <http://www.socialcapitalgateway.org/NV-eng-basicreadings.htm>.
- Schuller, T. 2001. *The Complementary Rules of Human and Social Capital*. Canadian Journal of Policy Research, Vol.22, No. 1, (March 2001). <http://www.oacd.ceri.article>. <http://www.google.com>.
- Badan Litbang Pertanian. 2004. *Rancangan Dasar Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Inovasi Pertanian (Primatani)*, Departemen Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Jakarta.
- Brata, A. G. 2004. *Nilai Ekonomis Modal Sosial pada Sektor Informal Perkotaan*. Lembaga Penelitian Universitas Atmajaya. Yogyakarta. [aloy.gb@mail.uajy.ac.id](mailto:aloy.gb@mail.uajy.ac.id). [www.google.com](http://www.google.com). (2/08/07).
- Fukuyama, F. 2007. *Trust. Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Penerjemah: Ruslani; Terjemahan: *Trust. The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. Penerbit Qalam. Yogyakarta.
- Puspadi, K., I. M. Wisnu, Prisdeminggo, Y. G. Bulu dan S. Hastuti. 2005. *Evaluasi Partisipatif Dengan Teknik PRA Perbaikan Pendapatan Petani Miskin Melalui Inovasi di Kabupaten Lombok Timur*. Laporan Penelitian. Balai Pengkajian Inovasi Pertanian Nusa Tenggara Barat. Mataram. (Tidak dipublikasikan).
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Rafika Aditama. Bandung.
- Putnam, R. 1995. *Bowling Alone: America's Declining Social Capital*. Journal of Democracy. 6:65-78.
- Yustika, A. E. 2006. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori dan Strategi*. Bayumedia Publishing. Malang.